

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI
INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (STUDI PEMERINTAH PROVINSI RIAU)**

**Oleh
Kapian Nursewan
Pembimbing : Kennedy dan Rheny**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email: kapian.nursewan@yahoo.com*

*Effect of internal control system and the government of the value of financial
supervision government financial reporting information regional
(Riau province government study)*

ABSTRACT

Based on the examination of the BPK in the second half of 2011 states that of 516 LKPD, BPK gives an unqualified opinion only 34 LKPD alone. An evaluation of 516 LKPD, there were 4,178 cases of weakness of the internal control system (SPI), which includes accounting control system weaknesses and reporting. It shows that the system of internal controls on government agencies have not been implemented optimally, so that it may have an influence on the value of information pelaporan local government finance and examination is due to local government financial statements do not meet the values characteristic of information from the financial statements themselves. Writer wanted to know the influence of these factors on the value of the local government financial reporting information. To test the hypothesis, the author uses primary data. Technical analysis of the data using a system of internal control and financial oversight of local government as an independent variable and the value of local government financial reporting information as the dependent variable. Once the data was analyzed, it was found that all the above factors significantly influence the value of government financial reporting information. That is, if the system of internal control and financial oversight of local government, the better the information value of the resulting financial reporting will better the government.

Key words: value of information, internal control, government, financial, and supervision.

PENDAHULUAN

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan

oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-

lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2007:1). Akuntabilitas publik merupakan dasar pelaporan keuangan dipemerintahan karena adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi terhadap pemakai. Informasi tersebut dianggap bernilai jika dapat dipahami dan digunakan. Unsur-unsur pembentuk laporan yang bernilai menurut Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat di bandingkan dan (d) dapat dipahami. Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya tetapi justru untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan sosial, politik, dan ekonomi. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan SAP yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib

memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Salah satu hal yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah adalah sistem pengendalian intern akuntansi (Indriasari dan Ertambang, 2008). Sistem pengendalian intern ini menjadi sangat penting karena sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja mau pun tidak disengaja. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah (Afrianti, 2011). Pengawasan keuangan daerah terkait dengan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah di kota Pekanbaru.

Temuan pemeriksaan BPK dalam semester II tahun 2011 menyatakan bahwa dari 516 LKPD, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian hanya 34 LKPD saja. Hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan IHPS II tahun 2011 juga mengungkapkan kerugian negara pada tahun 2010 sebesar Rp 20,25 triliun. akibat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan (BPK RI). Hasil evaluasi atas 516 LKPD, terdapat 4.178 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Ini menunjukkan bahwa, sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah belum dilaksanakan secara optimal, sehingga hal tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Salah satu komponen pengendalian internal yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi seperti diharapkan dan mereka dimodifikasi sesuai dengan perubahan dalam kondisi-kondisi (Arens, 2003:412). Dalam komponen pengendalian internal yang lain, aktivitas pengendalian, terdapat bentuk aktivitas pengendalian yaitu pemisahan tugas yang berguna untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan usaha untuk menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan tugas oleh orang-orang terkait yang

akan mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah sebagai berikut : 1). Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah? 2). Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

Sesuai dengan penjelasan di atas tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. 2). Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

TELAAH PUSTAKA

Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen perusahaan yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan perusahaan. Untuk dapat menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang akan disampaikan maka perusahaan harus menyusun pelaporan keuangan terlebih dahulu.

Menurut Suwardjono (2006: 18) pelaporan keuangan adalah Struktur dan proses tentang bagaimana informasi keuangan untuk semua unit usaha dan pemerintahan harus disediakan dan dilaporkan dalam suatu negara untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomik. Perusahaan

mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode.

Menurut Mulyanto (2009; 20) manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditaksir dari nilai efektivitasnya.

Menurut Arfianti (2011) nilai informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah: informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Xu, et al. (2003) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan sistem serta implementasi sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dari sebuah informasi. Keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan sumber daya manusia. Namun sistem yang sudah berjalan harus dikontrol agar tetap dapat berjalan dengan baik.

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pemegamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi:

1. Pengendalian umum
2. Pengendalian aplikasi

SAS mendefinisikan lima komponen pengendalian intern yang saling

berkaitan pada pernyataan COSO (Sawyer et al, 2005) yaitu:

1. Lingkungan pengendalian,
2. Penilaian risiko,
3. Aktivitas pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi
5. Pengawasan.

Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010).

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu

penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan (Yosa, 2010).

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*).

Adapun jenis – jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut.

- a. Pengawasan intern
- b. Pengawasan ekstern
- c. Pengawasan preventif
- d. Pengawasan represif

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian intern pemerintah merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan,serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai

berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah . Dengan demikian, pengendalian intern merupakan *fundasigood governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD.

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011).

Berdasarkan telaah teoritis yang telah dijelaskan di atas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H1: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51

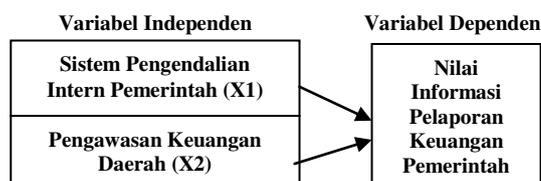
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan telaah teoritis yang telah dijelaskan di atas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H2 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

**Gambar 1
Model Penelitian**



MODEL PENELITIAN

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi juga dapat diartikan sebagai totalitas semua nilai yang mungkin menghitung ataupun pengukuran kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan lengkap dan jelas yang ingin di pelajari sifatnya. Populasi dari penelitian ini adalah 50 SKPD yang terdiri dari pegawai bagian pengelola keuangan SKPD.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* sejumlah 150 responden dari jumlah populasi pengelola SKPD, dimana populasi yang akan dijadikan sampel penelitian merupakan populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti dan disesuaikan dengan tujuan peneliti. Dengan mempertimbangkan arah dan tujuan serta keterbatasan yang ada pada peneliti, maka peneliti memutuskan sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang karyawan yang duduk pada bagian keuangan di kantor-kantor dinas daerah di lingkungan pemerintahan Propinsi Riau yaitu kepala bagian keuangan, bendaharawan, dan staf penyusun laporan keuangan.

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah menggunakan kuesioner yang menggunakan daftar pertanyaan kepada pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 (lima) poin dengan skala *Likert* dengan lima pilihan jawaban. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mendapat pengaruh dari instrumen yang telah digunakan dalam

penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Budi Mulyana (2006).

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument penelitian. Pengujian terhadap kualitas data penelitian ini dapat dilakukan dengan uji validitas dan uji reabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2005). Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah *valid*. Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2005). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran *one Shot* hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α).

Analisis data menggunakan regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

X1 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

X2 : Pengawasan Keuangan Daerah

a : Konstanta

b1 : Slope regresi atau koefisien regresi berganda dari X1

b2 : Slope regresi atau koefisien regresi berganda dari X2

e : Kesalahan residual (*error turn*)

Uji Statistik t

Uji signifikansi parameter individual digunakan untuk mengetahui atau mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis dilakukan dengan melihat tabel *coefficients* pada output SPSS. Dasar pengambilan keputusannya:

- 1) Signifikan bila $r \text{ value} < \alpha$ (0,05) sehingga menerima H1.
- 2) Tidak signifikan bila $r \text{ value} > \alpha$ (0,05) sehingga menolak H1.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2005). Jika hasil F test diperoleh nilai F hitung lebih besar dari df dan signifikansi jauh di bawah derajat

kepercayaan yang ditentukan maka model regresi dapat dikatakan variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya:

- 1) Signifikan bila r value $< \alpha$ (0,05) sehingga menerima hipotesis.
- 2) Tidak signifikan bila r value $> \alpha$ (0,05) sehingga menolak hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi R^2 yang merupakan besaran non negatif. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan 1 jika $r = 0$ atau mendekati 0, maka hubungan antara dua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. Bila $r = +1$, atau mendekati 1 maka korelasi antara dua variabel dikatakan positif dan sangat kuat.

Deskripsi Data Penelitian

Kuesioner yang dibagikan sebanyak 150, jumlah kuesioner yang tidak dikembalikan sebanyak 49 dan pengisian jawaban tidak lengkap 7 buah, dan yang diisi lengkap (dapat diolah) sebanyak 94 buah.

Tabel 1
Daftar Kuesioner

Item	Jumlah	Presentase
Jumlah kuesioner yang disebar	150	100%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	49	32,67%
	101	
Jumlah kuesioner yang pengisian jawaban tidak lengkap	7	4,66%

Jumlah kuesioner yang pengisian data diri tidak lengkap	0	0%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah (sampel)	94	62,67%

Sumber: Data primer diolah, 2014

Karakteristik Responden

Tabel 2
Profil Responden

Data	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin:		
Pria	68	72,34%
Wanita	26	27,66%
Pendidikan:		
SMA	21	22,34%
DIII	11	11,70%
S1	47	50%
S2	15	15,96%
Lama Bekerja:		
0-5 Tahun	9	9,57%
6-10 Tahun	7	7,45%
11-15 Tahun	14	14,89%
Diatas 15 Tahun	64	68,09%

Sumber: Data diolah, 2014

Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Tabel 3
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah	94	20.00	44.00	37.3191	4.09619
Pengendalian Intern	94	31.00	65.00	53.2766	7.30209
Pengawasan Keuangan Daerah	94	44.00	99.00	83.8065	9.67433
Valid N (listwise)	94				

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Uji Validitas

Kolom *Corrected Item Total Correlation* merupakan korelasi antara skor item dengan total item yang dapat

digunakan untuk menguji validitas instrumen. Untuk menguji validitas butir pertanyaan tersebut harus dibandingkan dengan r table pada $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan. Pada signifikansi 5 % dengan derajat bebas $df = 92$, r tabel sebesar 0,202.

Hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena r hitung $>$ r tabel pada taraf signifikansi 5 %. Berdasarkan hasil ini maka variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengawasan Keuangan daerah dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah dengan 47 pertanyaan dinyatakan lolos hasil uji validitas.

Hasil Uji Reliabilitas

Nilai reliabilitas dilihat dari *cronbach alpha* masing-masing instrument penelitian jika memiliki *cronbach alpha* lebih besar dari 0,5 dianggap reliabel. Secara rinci hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Reliability Statistics

Kuisisioner	Cronbach's Alpha	N of Items
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah	.837	10
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.821	15
Pengawasan Keuangan Daerah	.913	22

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* $>$ 0,5 untuk variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengawasan Keuangan daerah dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengawasan Keuangan

daerah dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah adalah reliabel.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 5

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.248	3.959		4.609	.000
	Pengendalian Intern	.241	.052	.432	4.650	.000
	Pengawasan Keuangan Daerah	.174	.039	.375	2.879	.020

a. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah

Adapun acuan dalam pengujian hipotesis adalah :

- jika t hitung $<$ t table atau p value $>$ α (0,05), maka H_a ditolak dan H_o diterima
- jika t hitung $>$ t table atau p value $<$ α (0,05), maka H_a diterima dan H_o ditolak

Dengan melihat hasil SPSS versi 18 pada tabel 9, dan memperhatikan t tabel yang dilihat pada tabel t 0,025 (0,05 : 2) dengan Df ($n-k-1$) = 90. Nilai t tabel diperoleh sebesar 1,987.

Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki t hitung sebesar 4.650 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0,05 maka H_o1 ditolak dan H_a1 diterima. Ini berarti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan daerah dengan demikian hipotesis pertama terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menerapkan Sistem pengendalian intern pemerintah maka akan berimplikasi meningkatkan Nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Pengendalian intern pemerintah merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Armando (2013) yang menjelaskan bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Sistem pengendalian intern disini sangat mendukung Nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Variabel Pengawasan Keuangan Daerah memiliki t hitung sebesar 2.879 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.020 yang lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini berarti Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan daerah dengan demikian hipotesis kedua terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menerapkan Pengawasan keuangan daerah maka akan berimplikasi meningkatkan Nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu

penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan (Yosa, 2010).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Armando (2013) yang menjelaskan bahwa Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah disini sangat mendukung Nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Hasil Uji Signifikan F (Uji F)

Tabel 6
Hasil Uji F-Hitung
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	368.702	2	184.351	14.314	.000 ^b
Residual	1159.104	90	12.879		
Total	1527.806	92			

Dependent Variable : Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah
Predictors : (Constant) , Pengawasan Keuangan Daerah, Pengendalian Intern

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam pengujian hasil F hitung sebesar 14.314 lebih besar dari F tabel sebesar 3,10 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini berarti Sistem pengendalian intern pemerintah dan Pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.491 ^a	.241	.224	3.58872	1.527

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan Daerah, Pengendalian Intern

b. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R (koefisien korelasi) sebesar 0.491. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang relatif sedang antara variabel independen (Sistem pengendalian intern pemerintah dan Pengawasan keuangan daerah) terhadap variabel dependen (Nilai informasi pelaporan keuangan daerah).

Adjusted R square pada tabel menunjukkan nilai 0,224. Hal ini menggambarkan bahwa sumbangan variabel independen (Sistem pengendalian intern pemerintah dan Pengawasan keuangan daerah) terhadap variabel dependen (Nilai informasi pelaporan keuangan daerah) sebesar 22,4% sedangkan sisanya 77,6% merupakan sumbangan dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, misalnya Kompetensi Pegawai dan Penerapan Teknologi Informasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 18, diperoleh beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka semakin tinggi pula Implementasi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah yang dimiliki.
2. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat implementasi Pengawasan Keuangan Daerah maka semakin tinggi pula Implementasi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah yang dimiliki.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis menyarankan agar :

1. Agar dapat memastikan bahwa kuesioner yang dikirim benar-benar diisi oleh objek yang diinginkan peneliti maka penelitian selanjutnya seharusnya memperkuat dengan metode wawancara atau observasi secara langsung.
2. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat menambah sampel tidak hanya pada Pemerintahan Propinsi Riau saja tetapi mungkin dengan sampel seluruh Pemerintahan di Indonesia dan menambah variabel seperti Kompetensi Pegawai dan Penerapan Teknologi Informasi agar dapat menghasikan penelitian yang lebih baik dan Penelitian selanjutnya memperluas lingkup

penelitian agar dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam bidang akuntansi keuangan.

3. Bagi Akademisi Diharap dapat menambah wawasan pemikiran dalam hal akuntansi khususnya pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah di Propinsi Riau.
4. Bagi Pihak Lain yang Terkait dan Penelitian Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna bagi pihak-pihak lain yang bersangkutan dan Penelitian selanjutnya di kabupaten atau kota lain di seluruh Indonesia, dan kegunaan tersebut dapat berdampak baik bersifat praktis maupun teoritis.
5. Bagi Pegawai Pemerintah Propinsi Riau Peneliti menyarankan agar para pegawai yang ada dilingkungan SKPD Pemerintah Propinsi Riau lebih ikut serta dalam peningkatan Nilai Informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah agar terwujudnya *good governance*, dan juga Peneliti menyarankan agar pimpinan yang ada disetiap SKPD Pemerintah Propinsi Riau lebih memantau kinerja para bawahan dalam setiap penyusunan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Afriyanti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan*

Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang). Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Arens, Alvin. 2008. *Audit Jasa Assurance*, Edisi Keduabelas Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

Armando, Gery. 2013. Pengaruh sistem pengendalian inter pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah kota bukitinggi. *Jurnal Universitas Negeri Padang*.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Rencana Strategis 2011-2015*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Mulyana, Budi., 2006. "Pengaruh Penyajian Nerca Daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparasi dan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2 No. 2. Mei 2006.

Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.

Xu Hong Jiang, Jeretta H.N., G.Daryl Nord, Binshan Lin. 2003. *Key Issues of Accounting Information Quality Management : Autralian Case Study*. Industrial Management and Data System. Vol 103. Issue 7.

Indriasari, Desi. 2008. "Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia,

pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir”. Universitas Diponegoro. Semarang.

Tengah di Provinsi Maluku).”
Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 08, No. 01, pp.1466-148.

Yosa, 2010, Pengawasan Sebagai Sarana Penegakan Hukum Administrasi Negara, Jurnal Depdagri. Jakarta.

Mardiasmo. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Mulyanto, Agus. 2009. *Sistem informasi Konsep & Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sawyer, Lawrence B., et al. 2005. *Internal Auditing*, Terjemahan ; Adhiriani Desi, Dan Permatasari, Ika. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.

Suwardjono. 2006. Teori Akuntansi, Perencanaan Pelaporan Keuangan. BPFE, Yogyakarta.

Tuasikal, A. 2007. “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku